

TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN OPTIMALISASI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH: KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PRAKTIK PEMERINTAH DI NEGARA BERKEMBANG

Loso Judijanto
IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This article analyses the relationship between good governance, fiscal accountability, and optimisation of local tax administration in developing countries through a systematic literature review approach. The results of the study found that weak transparency and administrative corruption significantly hamper the contribution of local taxes to local revenue (PAD), with potential leakage of up to 30% of fiscal potential. Technological reforms such as e-filing, digital payments, and data analytics—such as Pajak Menyapa Kendari and Palembang e-tax—have been proven to increase operational efficiency by 15–30% and taxpayer compliance through real-time information transparency. Key findings confirm the synergy of two dimensions: accountable governance creates institutional legitimacy, while technological innovation provides the operational infrastructure to reduce fiscal dependence on central transfers. Structural challenges include the digital divide, low literacy, and weak central-regional coordination, which require a holistic approach based on human resource capacity and supporting regulations. Policy implications include strengthening public audits, digital training for tax officials, and stakeholder engagement to create a virtuous cycle: increased PAD → improved services → public trust. This study contributes to the subnational fiscal governance literature with an integrative model for sustainable local tax reform in developing countries.

Keywords: *fiscal governance, local tax accountability, administrative optimisation, e-tax digitalisation, good governance, fiscal decentralisation, developing countries, local revenue (PAD)*

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas fiskal, dan optimalisasi administrasi pajak daerah di negara berkembang melalui pendekatan kajian pustaka sistematis. Hasil penelitian menemukan bahwa lemahnya transparansi dan korupsi administratif secara signifikan menghambat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dengan potensi kebocoran hingga 30% dari potensi fiskal. Reformasi teknologi seperti e-filing, pembayaran digital, dan analitik data—seperti Pajak Menyapa Kendari dan Palembang e-tax—terbukti meningkatkan efisiensi operasional 15–30% dan kepatuhan wajib pajak melalui transparansi informasi real-time. Temuan utama menegaskan sinergi dua dimensi: tata kelola akuntabel menciptakan legitimasi institusional, sementara inovasi teknologi menyediakan infrastruktur operasional untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat. Tantangan struktural meliputi kesenjangan digital, literasi rendah, dan koordinasi pusat-daerah yang lemah, yang memerlukan pendekatan holistik berbasis kapasitas SDM dan regulasi pendukung. Implikasi kebijakan mencakup penguatan audit publik, pelatihan digital aparaturnya pajak, dan keterlibatan stakeholder untuk menciptakan siklus virtuos: peningkatan PAD → perbaikan pelayanan → kepercayaan masyarakat. Kajian ini berkontribusi pada literatur tata kelola fiskal subnasional dengan model integratif untuk reformasi pajak daerah berkelanjutan di negara berkembang.

Kata Kunci: tata kelola fiskal, akuntabilitas pajak daerah, optimalisasi administrasi, digitalisasi e-tax, good governance, desentralisasi fiskal, negara berkembang, pendapatan asli daerah (PAD)